

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai syarat keilmiahan maka diperlukan adanya suatu penelitian dengan suatu kerangka dasar teori yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau defenisi tertentu. Dalam bagian ini disampaikan beberapa teori yang menjadi acuan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya.

A. Kota

Kota, menurut definisi universal, adalah sebuah area *urban* yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan atau status hukum. Sedangkan dalam konteks Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

Menurut Melville, kota merupakan suatu tempat yang mempunyai karakteristik:

- a. Secara morfologi, bangunan-bangunan lebih bagus kondisinya sedangkan pemukiman penduduk sangat rapat;
- b. Secara ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonominya berjalan lancar dan cepat, penduduknya mempunyai peran ekonomi yang sangat beragam;
- c. Secara sosial, tipe-tipe penduduk di kota beragam pula karena mereka lebih banyak yang pendatang, komunikasinya pun berlangsung cepat dan lugas karena penduduknya individualistis¹.

Menurut Freeman, kota mempunyai 4 kecirian meliputi: penyediaan fasilitas untuk seluruh warga: penyedia jasa (tenaga); penyedia jasa profesional (bank

¹Melville C. Branch ; penerjemah : Bambang HariWibisono, 1996. *Perencanaan kota komprehensif / Pengantar dan Penjelasannya*. Gadjah Mada University Press,

kesehatan dan lain-lain); serta memiliki pabrik (industri). Pembangunan perkotaan merupakan suatu proses pembangunan sektor perkotaan (*urban sector*) yang tidak dibatasi oleh kawasan perkotaan dalam arti fisik/batasan administratif wilayah (*town/city*). Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah pembangunan perkotaan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dengan sekaligus menjamin ketersediaan sumber daya serta kelestarian lingkungan pada masa mendatang.²

Seringkali kota (*city*) diidentikan definisinya dengan perkotaan (*urban*), padahal diungkapkan Bintarto dalam pengamatan kota terdapat tiga istilah yang tercakup dalam kota *urban*, yaitu *city*, *town* dan *township*.³

Jika istilah ini digunakan di Indonesia, maka kota *urban* dapat diartikan sebagai suatu bentuk aglomerasi penduduk yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern dan kota *city* dapat diartikan

sebagai pusat *urban* (kota utama). Sedangkan pada bagian lain Haeruman memberikan pengertian yang fungsional untuk kota/perkotaan yaitu pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai status pemerintahan sendiri dan kiranya telah mempunyai bentuk wilayah administrasi maupun yang belum mempunyai status pemerintahan tetapi memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan serta belum memiliki batas administrasi.⁴

Dengan demikian definisi perkotaan lebih luas maknanya daripada kota, sebab perkotaan lebih meruju pada fungsi suatu wilayah dimuka bumi yang memiliki ciri yang sama dengan kota maupun wilayah tersebut, tidak ditetapkan secara yuridis sebagai kota. Ditambahkan pula oleh Haeruman, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai perkotaan, dengan melihat aspek tingkat kepadatan penduduk yang tinggi,

² Raldi Hendro Koestoer dkk, 2001, *Dimensi Keruangan Kota : Teori Dan Kasus*, UIP, hlm 19

³ M. Ivan Syamsyahputra, 2006, *Kajian perkembangan karakter kekotaan pada desa-desa di kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada, hlm 80

⁴ Ibid

sebagian besar kegiatan utama masyarakat di sektor non pertanian serta status sosial masyarakat yang heterogen, baik dari segi adat, budaya, dan agama⁵.

Kota pada umumnya berawal dari suatu pemukiman kecil, yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Sejalan dengan waktu, kota mengalami perkembangan. Menurut Mellville C. Branch hal ini akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami kota serta adanya perubahan sosial, ekonomi dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya.⁶

Teori-teori struktur kota yang ada digunakan mengkaji bentuk-bentuk penggunaan lahan yang biasanya terdiri dari penggunaan tanah untuk perumahan, bisnis, industri, pertanian dan jasa.

1. Teori konsentris

Dikemukakan oleh E.W. Burgess pada tahun 1923 yakni pembangunan kota yang keluar dari daerah pusat kota yang polanya akan membentuk lingkaran. Zona pertama adalah CBD yang dikelilingi daerah transisi. Kemudian secara berurutan keluar yaitu zona tempat tinggal para buruh, perumahan untuk kelas menengah dan zona penglaju. Pada prakteknya, pada kota yang strukturnya seperti zona konsentris menuju jalan berbentuk radial menuju pusat kota.

2. Teori Sektor

Tahun 1939 ekonomi Homer Hoyt mengatakan tata guna lahan berkembang kearah luar pusat kota yang terfokus pada *rute* jalan arteri. Teori ini merupakan improvisasi dari teori konsentris dengan memperhatikan faktor transportasi dalam kota

3. Teori pusat kegiatan Ganda

⁵Raldi Hendro Koestoer dkk , *Dimensi Keruangan Kota : Teori Dan Kasus*, UIP, 2001, hlm 39

⁶Melville C. Branch : penerjemah : Bambang HariWibisono, 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif / Pengantar dan Penjelasannya*.Gadjah Mada University Press, hlm 78

Teori ini berasal dari C.D. Harris dan E. Ullman pada tahun 1945 yang menyatakan kota berbentuk sel. Perkembangan kota mengelilingi daerah-daerah yang berkembang didalam kota tersebut. Faktor yang mempunyai perkembangan suatu daerah yakni aktivitas manusia, fasilitas yang ada dalam melakukan aktivitas, sumber daya alam serta manusia.

Secara fisik perkembangan suatu kota apat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama pemukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkap fasilitas kota yang mendukung kegiatan soaial dan ekonomi kota.⁷

Selanjutnya Sujarto menjelaskan perkembangan kota pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain. Selain itu dijelaskan pula bahwa suatu kota dapat berkembang secara alamiah ataupun berkembang secara teratur dan terarah sesuai dengan rencana kota. Tiga faktor utama yang mepengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu kota adalah manusia, kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan antar pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia yang lainnya. Faktor-faktor tersebut secara fisik akan termanifestasikan kepada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Tuntutan kebutuhan ruang ini yang akan tercermin kepada perkembangan dan perubahan tata guna tanah kota yang mana kemudian faktor persyaratan fisik akan sangat menentukan.⁸

Siklus kota terjadi akibat oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi, aksesibilitas yang semakin tinggi ke pusat-pusat pelayanan serta adanya tranformasi struktural yang mendorong perkembangan sektor-sektor strategis, seperti industri, perdagangan, jasa, perumahan dan pemukiman. Ditambahkan oleh

⁷ *Ibid*

⁸ Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, hlm 33

Zulkarnain ekspresi keruangan kenampakan kota akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik meliputi: Topografi, geologi, geomorfologi, dan tanah, sedangkan untuk faktor non fisik meliputi: pertumbuhan penduduk, persaingan memperoleh lahan, perencanaan dan perkembangan teknologi.

9

B. Manajemen Penataan Ruang Kota

Dalam hal ini yang dimaksud dengan manajemen penataan kota merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan mengatur struktur ruang kota dan segala sesuatu yang berupa baik sistem ekonomi atau politik, perubahan peningkatan pembangunan hingga berpengaruh pada pola pikir masyarakat itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai bentuk penghubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintahan daerah baik kota maupun metropolitan, secara tipikal harus menangani enam sektor yang saling berhubungan yaitu, pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas social dan pembangunan ekonomi.

Definisi manajemen penataan kota yang dirumuskan oleh Edward Leman dari *urban management* program,³ merupakan rumusan sederhana dan pokok yang menggunakan pendekatan *problem solving oriented*, yang masih ditemukan dalam setiap manajemen pemerintahan atau perusahaan swasta.

Dengan demikian, kota harus dapat berfungsi secara efisien. Untuk itu di butuhkan perencanaan kota yang efektif. Perencanaan kota ini menyangkut perencanaan tata ruang dan perencanaan manajemen pelayanan kota. Perencanaan kota yang efektif ini diperlukan guna menghindarkan beberapa hal, antara lain: (1) perkembangan kota secara acak yang pada gilirannya menimbulkan kesemrawutan;

⁹ Zulkarnain, Hanan, Kajian perkembangan fisik kota pertambangan :: Studi kasus di Kota Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999, hlm 99

(2) penyediaan fasilitas pelayanan dan infrastruktur yang mahal dan tidak efisien; (3) spekulasi tanah yang dapat mengakibatkan pelipatgandaan biaya pembangunan; (4) pembangunan lahan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.¹⁰

Mengenai perencanaan pembangunan kota ini, sebenarnya telah dikenal sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, kehidupan kota terpusat pada sebuah bangunan tinggi yang dikelilingi tembok yang tinggi.¹¹ Sejak itu, perencanaan pembangunan kota terus mengalami perkembangan. Mulai ekade 1970-an terdapat kecenderungan baru dalam perencanaan kota, yang meliputi:

1. Pengendalian pertumbuhan dan menangani kemunduran, menggunakan mekanisme peraturan bangunan dan penggunaan lahan, perencanaan lingkungan pemukiman serta pengendalian urbanisasi.
2. Perencanaan lingkungan (*community*), menggunakan mekanisme pelestarian kota lama dan lingkungan pemukiman. Dalam hal ini lingkungan pemukiman dianggap sebagai unit yang ideal untuk melaksanakan program perencanaan agar efektif, terutama bila strategi perencanaan kota yang menyeluruh telah ada untuk digunakan sebagai landasannya. Konservasi dan penggunaan kembali bangunan tua dengan beberapa penyesuaian, serta kawasan tertentu. Hal ini dilakukan sehubungan dengan gagasan bahwa bangunan klasik perlu dikonservasikan dalam rangka pelestarian budaya, di samping memang masih bisa dimanfaatkan untuk penggunaan yang berbeda. Langkah ini dianggap

¹⁰Budi Tjahjati S. Dan Imron Bulkin.” Arahan *Kebijaksanaan Tata Ruang nasional*”, Prisma, No. 2, LP3ES, Jakarta, 1994. Hlm 67

¹¹*Ibid*

lebih efisien dibandingkan jika membongkarnya dan kemudian mendirikan bangunan baru.

Rakodi untuk menggunakan pendekatan politik dalam mempelajari manajemen perkotaan, khususnya kemudahan dalam melaksanakan program pembangunan kota. Yang menjadi perhatian mereka adalah kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan perkotaan, karena banyaknya konflik yang muncul diantara berbagai aktor. Aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan kota adalah politisi, birokrat, kaum profesi (perencana, ahli lingkungan, dan lain-lain), pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

C. Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Abdul Wahab, kesadaran akan arti penting telaah yang sistematis mengenai implementasi kebijakan negara, baru muncul pada awal abad tahun 1970-an di negara Amerika Serikat.¹²

Studi mengenai pelaksanaan kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan, untuk itu Amir Santosa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Analisa mengenai pelaksanaan kebijakan (policies implementation) mencoba mempelajari sebab keberhasilan / kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, sedangkan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu tidak hanya bersifat teknis administrasi belaka, tetapi melibatkan juga masalah-masalah politik. Dengan demikian studi implementasi kebijakan, mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal ini terjadi, dan tidak *hanya berhenti pada pertanyaan apa yang terjadi.*”¹³

Memperkuat pernyataan Amir Santosa diatas bahwa pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya bersifat teknis administrasi belaka, Abdul Wahab mengemukakan fungsi implementasi mencakup pola penciptaan apa yang ada di dalam ilmu

¹² Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 22.

¹³ Amir Santosa, *Jurnal Ilmu Politik dan Suatu Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1989, hal. 8.

kebijakan negara (policy science) dan policy delivery system (system penyampaian atau penerusan kebijakan negara) yang biasa terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang yang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.¹⁴

Suatu kebijakan pemerintah atau negara akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak-dampak bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan Pemerintah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak efektif.

Tugas-tugas kewajiban badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan saja, melainkan juga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disyahkan atau dengan kata lain bahwa tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang paling penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan.

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan tidak terlepas dari penggunaan sarana-sarana terpilih, seperti yang pernah disampaikan oleh Hoogerweff sebagai berikut: “Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih

Jadi yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah tindakan-tindakan yang syah atau pelaksanaan suatu perencanaan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Suatu program kebijakan meliputi acara-acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijalankan, seumpama dalam bentuk tata cara yang harus diikuti

¹⁴ Abdul Wahab, *Op.Cit.*, hal.123.

dalam pelaksanaan, patokan-patokan yang harus diadakan pada keputusan-keputusan pelaksanaan atau proyek-proyek yang konkrit yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Apabila pelaksanaan sebuah kebijakan menemui kegagalan dalam arti tujuan yang diinginkan tidak tercapai sesuai yang diharapkan, maka secara otomatis akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu mengenai sebab-sebabnya. Pengetahuan tertentu tentang sebab-sebab itu dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya sebuah kebijakan itu dilaksanakan.

“Sebab musabab kegagalan suatu kebijakan ada sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, banyaknya dukungan dari pelaksanaan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan pembagian potensi-potensi yang ada.”¹⁵

Sementara itu Amiir Santosa mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang memebentuk antara kebijakan dan hasislnya. Variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktivitas pelaksanaan (enforcement), karaterestik dari agensi pelaksana, kondisi social politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksanaan dan penyelenggaraan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis merumuskan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan tujuan dan maksud dari pelakasanaan kebijakann tersebut dapat tercapai. Aspek-aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya,disposisi,sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Sekalipun dalam khasanah ilmu kebijakan Negara atau Analisis Kebijaksanaan Negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori-teori yang membahas tentang teori implementasi kebijaksanaan namun beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi pelbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

¹⁵.*Op.Cit.*, hal. 6

1) menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dimensi analisis dalam organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan, tugas, dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program-program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan.¹⁶ Isi kebijakan:

a) Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

b) Tipe Manfaat

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis, akan tetapi konkrit akan lebih mudah diimplementasikan.

c) Derajat perubahan yang diharapkan.

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan yang bertujuan menjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

d) Letak pengambilan keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian organisasi dibawahnya.

e) Pelaksana Program

¹⁶ Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik dan Analisa*, Jakarta: Intermedia, 1991, hal. 22.

Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektivan, dan didikasi yang tinggi akan berpengaruh dalam prosesnya.

f) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya akan menentukan implementasi dan keberhasilan kebijakan.

Konteks Implementasi:

- a) Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan dan badan pelaksana maupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b) Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh.
 - c) Kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan instansi pelaksana program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tanggap berupa kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dari implementasi kebijakan.
- 2) Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan.

Secara diskriptif, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan merupakan ciri dari badan pelaksana, dimana dapat dijadikan suatu ukuran dan tujuan kebijakan. Yang merupakan sebagian sumber-sumber kebijakan atau setelah melalui sebuah tahapan kebijakan, atau bahkan kajian

komunikasi antar organisasi. Kegiatan pelaksanaan dapat juga sebagai ciri badan pelaksana setelah menerima masukan dan merupakan sebagian salah satu sikap pelaksana, yang akhirnya menjadi sebuah prestasi kerja.

Dalam pola kerja ada yang saling berhubungan antara ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, dan prestasi kerja. Adapun tanpa melalui sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan, ciri badan pelaksana dapat langsung dikatakan sebagai prestasi kerja. Yang semua ini tidak terlepas dari masukan sector lingkungan ekonomi, social dan politik, yang merupakan sumber-sumber dari kebijakan dan dapat dikatakan sebagai sikap para pelaksana setelah menganalisa semua permasalahan yang terjadi.

- 3) Model yang dikembangkan oleh David Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut A Framework for Implamentation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi kebijakan.¹⁷

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan.

Dari latar belakang dan pemikiran yang telah dikemukakan penulis diatas, dan dikaitkan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, maka variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan kota pemerintah yogyakarta tentang pengelolaan penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya, yang meliputi sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 2) Struktur birokrasi, yang meliputi koordinasi tingkat kewenangan.

¹⁷ Abdul Solihin Wahab, Dr., *Analisis Implementasi Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 59-82.

- 3) Kondisi lingkungan, yang meliputi wilayah dimana kebijakan tersebut dilaksanakan.
- 4) Sikap pelaksana, yang meliputi persepsi pelaksana, kebutuhan dan sosialisasi pelaksanaan program.

Berdasarkan point-point yang dikemukakan penulis diatas, dapat diperinci lebih lanjut dengan penjelasan sebagai berikut ini:

a) Sumber Daya

Factor-faktor penting yang mendukung terlaksananya sebuah kebijakan dengan baik adalah tersedianya sumber daya yang memadai, berkaitan dengan hal tersebut, Noto Atmojo mengemukakan bahwa:

“Pembangunan suatu bangsa memerlukan asset pokok yang disebut sumber daya, tidak hanya sumber daya manusia dan sumber daya alam, melainkan juga ada sumber dana dan sumber daya buatan.”

Sumber daya merupakan variabel yang sangat menentukan bagi keberhasilan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

b) Stuktur Birokrasi

Standar prosedur pelayanan dan bersifat rutin dan memberikan kemungkinan pegawai publik untuk banyak membuat keputusan setiap harinya. Tetapi hal itu sangat diperlukan untuk meningkatkan waktu dan juga mampu membawa prosedur yang ditetapkan secara fleksibel pada organisasi yang kompleks dan berfungsi sebagai pengawas untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukan pembagian fungsi dan tanggung jawab dari policy maker kepada unit-unit organisasi didalam lingkungan organisasi intern.

Stuktur birokrasi suatu kebijakan pada dasarnya melibatkan banyak pihak-pihak terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu kondisi struktur

organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh pada kelancaran implementasi kebijakan. Di dalam struktur organisasi birokrasi yang baik adalah yang mampu mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam struktur tersebut.

c) Kondisi Lingkungan

Dalam implementasi penyelenggaraan perparkiran di wilayah kota Yogyakarta, kondisi lingkungan yang dimaksud adalah berupa kondisi social dan kondisi perekonomian. Dalam konteks kondisi social, yaitu budaya dan pola perilaku masyarakat yang ada, yang berpengaruh pada sikap penerimaan masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi perekonomian yang dimaksud disini adalah tercermin dalam besarnya pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada peningkatan penggunaan kendaraan, baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

d) Sikap pelaksana

Sikap pelaksanaan yang dimaksud meliputi persepsi sosialisasi implementasi kebijakan dan penerimaan kebijakan, yaitu semangat, kemauan, dan keinginan yang kuat dari implementator kebijakan untuk mensukseskan pengelolaan penyelenggaraan tersebut.

Faktor sumber daya, factor struktur, dan factor kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi dan pelaksanaan kebijakan, dimana factor-faktor tersebut, baik yang bersifat mendukung maupun yang tidak mendukung akan membentuk suatu persepsi, sehingga pada gilirannya akan tercermin dari tindakan para pelaksana kebijakan.